BUKU PEDOMAN PENCACAHAN

SURVEI KHUSUS PERUSAHAAN SWASTA NON-FINANSIAL (SKPS) TAHUN 2020

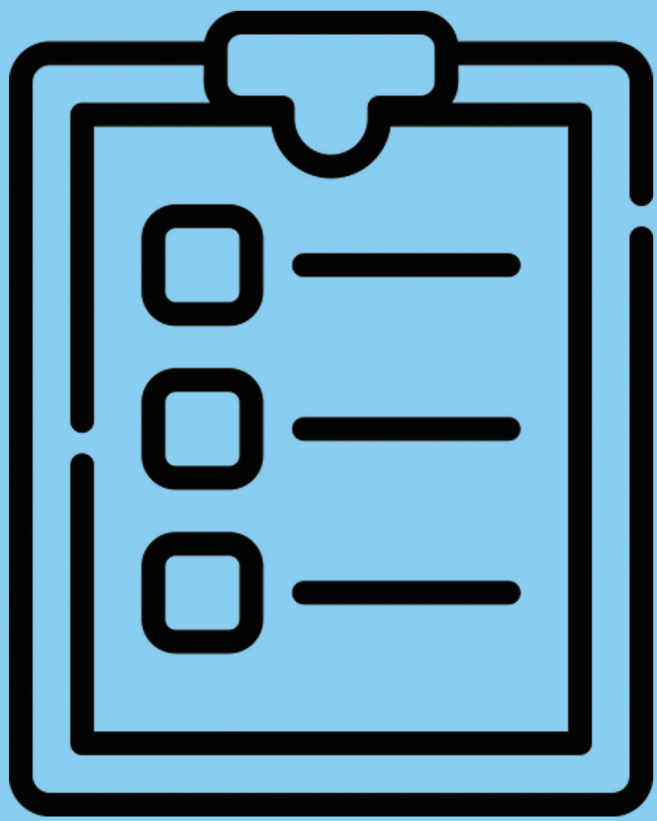

SUBDIREKTORAT NERACA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
DIREKTORAT NERACA PENGELUARAN

BADAN PUSAT STATISTIK

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN

SURVEI KHUSUS PERUSAHAAN SWASTA NON-FINANSIAL (SKPS) TAHUN 2020

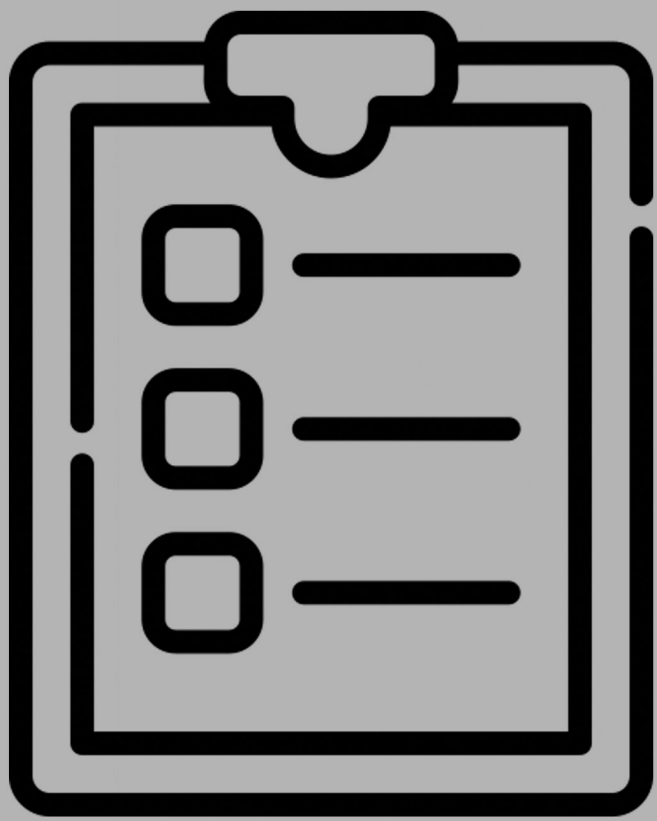

SUBDIREKTORAT NERACA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
DIREKTORAT NERACA PENGELUARAN

BADAN PUSAT STATISTIK

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 3

1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan 3

1.4. Jadwal Kegiatan 4

II. METODOLOGI SURVEI 5

2.1. Pemilihan Sampel 5

2.2. Jumlah Responden 5

2.3. Teknik Pencacahan 7

2.4. Petugas Lapangan 7

2.5. Penanggung Jawab 7

2.6. Pengolahan Data SKPS 7

III. KONSEP DEFINISI DAN CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN (KUESIONER) 9

BLOK I. Pengenalan Tempat... 9

BLOK II. Keterangan Umum Perusahaan 9

BLOK III. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 11

A. Aset/Harta. 11

A.1. Aset Lancar 11

A.2. Aset Tidak Lancar. 13

B. Liabilitas/Kewajiban dan Ekuitas/Modal. 17

B.1. Liabilitas/Kewajiban. 17

B.2. Ekuitas/Modal. 18

BLOK IV. Laporan Laba Rugi (LLR) dan Perubahan Saldo Laba (Pada Laporan Perubahan Ekuitas). 19

A. Laporan Laba rugi (LLR). 19

B. Perubahan Saldo Laba (Pada Laporan Perubahan Ekuitas) .. 22

BLOK V. Penambahan Aset Tetap 23

BLOK VI. Biaya Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja. 23

BLOK VII. Catatan. 24

BLOK VIII. Keterangan Petugas dan Responden. 24

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

System of National Accounts (SNA) 2008 yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) menyebutkan bahwa unit institusi domestik (residen) sebagai pelaku aktivitas ekonomi dikelompokkan menjadi lima institusi (sektor) yaitu sektor korporasi non-finansial, sektor korporasi finansial, sektor pemerintahan umum, sektor Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan sektor rumah tangga.

Salah satu sektor domestik yakni korporasi non-finansial mencakup korporasi swasta non-finansial dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) Non-finansial. Jika dilihat lebih rinci, korporasi swasta non-finansial dibedakan menjadi korporasi swasta non-finansial berbadan hukum (seperti PT, PT Terbuka, Yayasan, Koperasi) dan korporasi non-finansial swasta tidak berbadan hukum (CV, Firma, UD, PD dan lain-lain).

Dari sisi investasi non-finansial di Indonesia, kegiatan sektor korporasi swasta non-finansial merupakan bagian terbesar dan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai penopang pembangunan ekonomi yang berdampak pada tumbuhnya perekonomian, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Selama periode tahun 2014 – 2018 total investasi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 35,01 persen, yakni dari Rp. 3.657,15 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 5.129,24 triliun pada tahun 2018***).

Investasi tersebut dilakukan oleh pemerintah, korporasi non-finansial, rumah tangga, lembaga keuangan (korporasi finansial) dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT). Korporasi non-finansial tetap memegang peranan terbesar sebagai pelaku investasi nasional pada tahun 2018 dibandingkan dengan keempat institusi lainnya, yakni sebesar Rp 4.140,53 triliun atau 80,72 persen dari total investasi. Sementara itu, investasi yang dilakukan keempat institusi lainnya, yakni Rumah Tangga sebesar Rp 670,27 triliun (13,07%); pemerintah sebesar Rp 184,87 triliun (3,60%); Korporasi Finansial sebesar Rp 124,72 triliun (2,43%), dan LNPRT sebesar Rp 8,85 triliun (0,17%).

Uraian di atas menunjukkan sangat pentingnya peranan korporasi swasta non-finansial dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu disusun suatu laporan perusahaan swasta non-finansial yang akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak baik pemerintah, pengusaha maupun pihak lain yang peduli terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia pada tahun 2018 dan 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang salah satu fungsinya adalah penyedia data ekonomi makro, telah melakukan upaya kompilasi data statistik korporasi/perusahaan swasta non-finansial melalui Survei Khusus Perusahaan Swasta Non-finansial (SKPS). Agar kesinambungan proses pemantauan dan pengumpulan data terjaga, BPS melalui Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha akan melaksanakan kembali SKPS pada tahun 2020, yang mencakup data laporan keuangan perusahaan swasta non-finansial tahun 2018 dan 2019.

Tabel 1. Perkembangan Investasi Non-finansial di Indonesia Tahun 2014-2018

Sektor	2014	2015	2016*)	2017 **)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non-finansial	2.823,47	2.977,34	3.258,06	3.590,58	4.140,53
2. Korporasi Finansial	81,03	80,39	93,36	143	124,72
3. Pemerintah	147,35	215,43	167,22	208,66	184,87
4. Rumah Tangga	599,80	645,86	672,28	630	670,27
5. LNPRT	5,51	7,17	8,15	8,97	8,85
Jumlah	**3.657,15**	**3.926,19**	**4.119,07**	**4.581,21**	**5.129,24**

*) angka sementara
**) angka sangat sementara
***) angka sangat sangat sementara

Sumber: Neraca Arus Dana (2014-2018)

1.2. Tujuan

SKPS 2020 bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:

1. Karakteristik Korporasi/Perusahaan Swasta Non-finansial, antara lain tentang jenis usaha, struktur permodalan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.
2. Hasil transaksi usaha Korporasi/Perusahaan Swasta Non-finansial melalui laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (*Balance Sheet*) dan Laporan Laba Rugi (*Income Statement*), sehingga dapat diketahui struktur aset/harta/kekayaan, struktur pasiva (kewajiban dan modal), output, input (biaya) dan sebagainya.

Data yang diperoleh dari informasi-informasi diatas akan digunakan untuk menyusun:

a. Struktur neraca-neraca pokok Korporasi/Perusahaan Swasta Non-finansial.
b. Analisis deskriptif mengenai karakteristik usaha, struktur aset, struktur pasiva, output dan struktur biaya perusahaan sampel.

1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan

SKPS 2020 dilaksanakan di tiga puluh empat provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Adapun sasaran SKPS 2020 ini adalah Korporasi Swasta Non-finansial berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Lapangan usaha yang dicakup meliputi:

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi
L. Real Estate
M,N. Jasa Perusahaan
P. Jasa Pendidikan
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S. Jasa lainnya

Cakupan survei ini utamanya ditujukan untuk Korporasi Swasta Non-finansial induk atau tunggal, yang memiliki jumlah aset/harta cukup besar dan mempunyai laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disusun secara berkala dan teratur.

1.4. Jadwal Kegiatan

a. Persiapan dan Perencanaan	
1. Penyusunan Metodologi, Pedoman Pencacahan & Daftar Isian	Januari – Februari 2020
2. Penggandaan Pedoman Pencacahan dan Daftar Isian ……	Februari 2020
3. Pengiriman Dokumen ke Daerah ..……	Februari – Maret 2020
b. Pelaksanaan	
1. Pengambilan Sampel ..……	Februari 2020
2. Pencacahan……	Maret – Agustus 2020
3. Pemeriksaan dan Pengawasan ..…….……..	Maret – September 2020
4. Pengolahan di Daerah.....…….……..	April – September 2020
c. Analisa dan Penyajian	
1. Rekonsiliasi Hasil Pengolahan Daerah.....	Oktober - November 2020
2. Tabulasi ……	Oktober - November 2020
3. Analisa dan Penulisan Laporan..……	November - Desember 2020
4. Penggandaan dan Diseminasi Laporan..……	Desember 2020

II. METODOLOGI SURVEI

2.1. Pemilihan Sampel

Jumlah sampel SKPS 2020 sebanyak 1.750 responden dan tersebar di tiga puluh empat provinsi. Alokasi sampel menurut lapangan usaha dilakukan secara proporsional berdasarkan struktur ekonomi di masing-masing provinsi terpilih. Dengan pemilihan sampel sedemikian rupa, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara nasional. Alokasi sampel per provinsi ditunjukkan pada Tabel 2.

Hasil SKPS tahun 2020 akan disajikan menurut lapangan usaha sehingga diharapkan target sampel menurut target lapangan usaha dapat tercapai. Apabila penentuan sampel menurut lapangan usaha tidak terpenuhi, dapat dialokasikan ke lapangan usaha non-finansial swasta lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan setiap lapangan usaha.

2.2. Jumlah Responden

Tabel 2. Daftar Alokasi Sampel SKPS Tahun 2020 Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha

Provinsi	Lapangan Usaha															
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	B. Pertambangan dan Penggalian	C. Industri Pengolahan	D. Pengadaan Listrik dan Gas	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	F. Konstruksi	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	H. Transportasi dan Pergudangan	I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	J. Informasi dan Komunikasi	L. Real Estate	M,N. Jasa Perusahaan	P. Jasa Pendidikan	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	R,S. Jasa Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	10	2	2	0	0	3	6	2	1	1	1	0	1	1	0	**30**
Sumatera Utara	22	1	20	0	0	13	18	5	2	2	5	1	2	1	1	**93**
Sumatera Barat	9	1	3	0	0	3	5	4	0	2	1	0	1	0	1	**30**
Riau	18	20	19	0	0	7	8	1	0	1	1	0	0	0	0	**75**
Jambi	11	6	3	0	0	2	4	1	0	1	1	0	1	0	0	**30**
Sumatera Selatan	13	15	16	0	0	11	10	2	1	2	2	0	2	0	1	**75**
Bengkulu	8	1	1	0	0	1	3	2	0	1	1	1	1	0	0	**20**
Lampung	10	2	6	0	0	3	4	2	0	1	1	0	1	0	0	**30**
Kepulauan Bangka Belitung	4	3	4	0	0	2	3	1	1	0	1	0	1	0	0	**20**
Kepulauan Riau	1	6	16	0	0	8	4	1	1	1	1	0	1	0	0	**40**

Provinsi	Lapangan Usaha															
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	B. Pertambangan dan Penggalian	C. Industri Pengolahan	D. Pengadaan Listrik dan Gas	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	F. Konstruksi	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	H. Transportasi dan Pergudangan	I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	J. Informasi dan Komunikasi	L. Real Estate	M,N. Jasa Perusahaan	P. Jasa Pendidikan	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	R,S. Jasa Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DKI Jakarta	0	0	17	0	0	17	23	5	6	10	8	10	7	2	5	**110**
Jawa Barat	11	2	54	1	0	11	20	8	4	4	1	1	4	1	3	**125**
Jawa Tengah	19	3	48	0	0	14	18	4	4	4	2	0	6	1	2	**125**
DI Yogyakarta	9	0	12	0	0	8	7	5	9	7	6	1	7	2	2	**75**
Jawa Timur	17	5	38	0	0	13	24	5	8	6	2	1	3	1	2	**125**
Banten	5	1	23	2	0	8	10	9	2	3	6	1	3	1	1	**75**
Bali	12	1	5	0	0	7	7	8	20	4	3	1	4	2	1	**75**
Nusa Tenggara Barat	12	11	2	0	0	5	7	4	1	1	2	0	3	1	1	**50**
Nusa Tenggara Timur	14	1	1	0	0	5	5	3	0	3	1	0	5	1	1	**40**
Kalimantan Barat	8	2	5	0	0	4	5	2	1	1	1	0	1	0	0	**30**
Kalimantan Tengah	5	3	5	0	0	3	3	2	1	0	1	0	1	1	0	**25**
Kalimantan Selatan	12	16	12	0	0	7	8	5	2	3	2	1	4	2	1	**75**
Kalimantan Timur	4	23	9	0	0	4	3	2	0	1	0	0	1	0	0	**47**
Kalimantan Utara	3	8	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	**20**
Sulawesi Utara	7	1	3	0	0	3	3	3	1	1	1	0	1	1	0	**25**
Sulawesi Tengah	10	4	3	0	0	3	2	1	0	1	0	0	1	0	0	**25**
Sulawesi Selatan	18	4	10	0	0	10	11	3	1	4	3	0	4	1	1	**70**
Sulawesi Tenggara	15	11	3	0	0	7	7	2	0	1	1	0	2	0	1	**50**
Gorontalo	14	0	2	0	0	5	5	2	1	1	1	0	2	1	1	**35**
Sulawesi Barat	10	1	2	0	0	2	2	0	0	1	1	0	1	0	0	**20**
Maluku	7	1	1	0	0	2	4	1	0	1	0	0	2	1	0	**20**
Maluku Utara	5	2	2	0	0	2	4	2	0	1	0	0	1	1	0	**20**
Papua Barat	2	4	6	0	0	4	2	1	0	0	0	0	1	0	0	**20**
Papua	3	11	1	0	0	4	2	1	0	1	1	0	1	0	0	**25**
Jumlah	**328**	**172**	**356**	**3**	**0**	**204**	**249**	**100**	**67**	**71**	**58**	**18**	**77**	**22**	**25**	**1750**

2.3. Teknik Pencacahan

Pencacahan dilakukan dengan cara kunjungan. Petugas dari BPS Provinsi mendatangi setiap Korporasi/Perusahaan Swasta Non-finansial yang terpilih sesuai sampel. Daftar isian yang mencakup keterangan umum perusahaan **harus diisi petugas pada saat wawancara**. Untuk jenis data seperti Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi (LLR), petugas **diharapkan meminta atau mengkopi laporan keuangan perusahaan tersebut.**

2.4. Petugas Lapangan

Pencacahan SKPS 2020 akan dilakukan oleh staf yang ditugaskan oleh BPS Provinsi terpilih. Jika tidak ada staf BPS, dapat ditugaskan KSK atau mitra kerja dan dibekali dengan surat tugas. Petugas pengawas SKPS 2020 adalah tenaga teknis BPS provinsi yang berpengalaman mengawasi berbagai aktivitas survei BPS utamanya Kepala Seksi Neraca Konsumsi.

2.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab di tingkat pusat adalah Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI. Penanggung jawab daerah adalah Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di bawah koordinasi Kepala BPS Provinsi.

2.6. Pengolahan Data SKPS

Pengolahan data untuk Survei SKPS dilakukan di masing-masing daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi). Pengolahan SKPS menggunakan aplikasi berbasis *web*, dimana masing - masing daerah akan diberikan *username* dan *password* untuk dapat mengaksesnya. Panduan penggunaan aplikasi akan dituangkan secara lebih rinci pada buku pedoman aplikasi SKPS 2020.

“. . . sengaja dikosongkan . . . ”

III. KONSEP DEFINISI DAN CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN (KUESIONER)

Untuk memudahkan pengisian daftar isian (kuesioner) SKPS 2020 yang terdiri dari delapan blok, berikut ini diberikan pedoman pengisiannya. Untuk memperlancar pengecekan dan pemeriksaan tulislah daftar isian ini dengan huruf kapital.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Rincian 1 s/d 6: Isikan nama provinsi, kabupaten/kota, nomor urut sampel (NUS), nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan dan nomor telepon/email/fax.

BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui keterangan umum/karakteristik usaha Perusahaan Swasta Non-finansial.

Rincian 1: **Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial**

Isikan **tahun pertama kali** perusahaan melakukan operasi kegiatan usaha secara komersial pada tempat yang tersedia.

Rincian 2: Struktur Modal (%)

Isikan persentase besarnya modal perusahaan tahun 2019. Tulis sesuai status permodalannya yakni modal pemerintah, korporasi, luar negeri, dan lainnya pada tempat yang tersedia. Jumlah struktur modal harus sama dengan 100%.

Modal pemerintah, perusahaan/korporasi non-finansial, perusahaan korporasi/finansial, dan lainnya adalah besarnya modal atau saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan/korporasi, luar negeri, dan lainnya

Rincian 3: Bentuk Badan Usaha

Lingkari salah satu bentuk badan usaha yang tersedia sesuai dengan bentuk badan usaha perusahaan. Bentuk Badan Usaha adalah status yang dimiliki oleh suatu kegiatan ekonomi berdasarkan akta pendiriannya yang dikeluarkan oleh notaris, berupa akta notaris atau

berdasarkan suatu keputusan dari pejabat instansi yang berwenang. Bentuk badan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Perseroan Terbatas (PT)** adalah bentuk badan hukum perusahaan yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya, pemegang saham ikut serta berperan sesuai dengan besar-kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham. Bentuk badan hukum ini disahkan oleh notaris.
2. **Koperasi** adalah perusahaan yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk badan hukum koperasi ini dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. **CV/Firma** adalah bentuk badan usaha perusahaan perorangan yang modalnya dimiliki oleh beberapa orang dan digunakan untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bentuk badan usaha ini disahkan oleh notaris.
4. **Lainnya** adalah bentuk badan usaha yang belum termasuk kategori di atas seperti yayasan, PO, UD, dan sebagainya. Tuliskan bentuk badan usaha pada tempat yang tersedia.

Rincian 4: Lapangan Usaha Dari Kegiatan Utama

Lingkari salah satu jenis lapangan usaha yang tersedia sesuai dengan kegiatan utama perusahaan. Usaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, penentuan kegiatan utamanya berdasarkan:

- Kegiatan dengan nilai produksi/pendapatan terbesar.
- Jika nilai produksi/pendapatan besarnya sama, kegiatan utama ditentukan dari volume produksi/penjualan terbesar.
- Jika nilai produksi/pendapatan dan volume produksi/penjualan sama, kegiatan utama ditentukan dari waktu terbanyak yang digunakan.

- Jika nilai produksi/pendapatan, volume, dan waktunya sama, kegiatan utama ditentukan dari pernyataan responden.

Rincian 5: Produk (barang/jasa) Utama

Isikan jenis produk perusahaan yang **paling tinggi nilainya**.

Rincian 6: Pendapatan Usaha

Isikan pendapatan usaha perusahaan tahun 2019 dan 2018 (konsisten dengan Blok IV.A Rinc 1).

Rincian 7: Total Aset/Harta

Isikan total aset perusahaan tahun 2019 dan 2018 (konsisten dengan total aset dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) di Blok III Rinc A).

Rincian 8: Jumlah Tenaga Kerja (orang)

Isikan jumlah tenaga kerja perusahaan tahun 2019 dan 2018. **Jumlah Tenaga Kerja** adalah banyaknya tenaga kerja tetap dan tidak tetap yang biasanya bekerja setiap harinya di perusahaan ini.

BLOK III. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

A. ASET/HARTA adalah seluruh kepemilikan perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang. Secara umum, aset adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai nilai uang. Aset terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar.

1. ASET LANCAR adalah bagian harta yang dimiliki oleh perusahaan berupa uang tunai dan harta lain yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun **(≤ 1 tahun)**. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Jangka Pendek, Penyisihan Piutang Ragu-ragu, Persediaan, Pembayaran Dibayar di Muka, dan Aset Lancar lainnya.

1.1. Kas dan Setara Kas

- **Kas** adalah uang tunai (kertas dan logam) dan alat pembayaran lain yang diterima umum (cek, wesel, simpanan uang di bank dalam bentuk rekening giro), baik yang ada di dalam perusahaan (*cash on hand)* maupun yang disimpan di bank (*cash on bank)* yang sewaktu-waktu dapat digunakan.

- **Setara kas** meliputi cek, giro, dan deposito dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

1.2. Investasi Jangka Pendek adalah penanaman modal yang dilakukan guna memperoleh pendapatan tambahan secara periodik atau keuntungan atas penjualan kembali aset tersebut. Aset ini dikuasai untuk sementara waktu **(≤ 1 tahun)**.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito, Investasi dalam bentuk Instrumen Ekuitas, Investasi dalam bentuk Instrumen Utang, dan Investasi Jangka Pendek Lainnya (*Blok III.A Rinc 1.2.a s/d Rinc 1.2.d*).

1.2.a. Deposito adalah simpanan yang menghasilkan bunga dengan batas waktu tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan atas nama pemilik deposito tersebut. Deposito yang dicakup pada aset lancar meliputi deposito dengan jatuh tempo lebih dari 3 bulan dan kurang dari 1 tahun.

1.2.b. Investasi dalam Bentuk Instrumen Ekuitas (saham, dll) mencerminkan kepemilikan saham di perusahaan lain (saham biasa maupun preferen). Saham adalah penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.

1.2.c. Investasi dalam Bentuk Instrumen Utang (obligasi, dll) adalah warkat yang berisi pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu misalnya obligasi.

1.2.d. Investasi Jangka Pendek Lainnya adalah penanaman modal yang dilakukan perusahaan dalam bentuk surat berharga selain saham dan obligasi, misalnya reksadana.

1.3. Piutang Jangka Pendek adalah hak atau tagihan perusahaan kepada perusahaan lain yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo (≤ 1 tahun). Piutang jangka pendek terdiri dari Piutang Usaha, Piutang Pegawai, Piutang dari Perusahaan Afiliasi[1], dan Piutang Jangka Pendek Lainnya.

[1]Perusahaan afiliasi adalah suatu perusahaan yang berada dalam suatu sistem perusahaan induk.

1.4. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu adalah perkiraan penilaian atas piutang yang timbul karena piutang debitur yang diragukan pelunasannya. Perkiraan ini merupakan pengurangan aset (*contra assets)* atas perkiraan piutang ragu-ragu.

1.5. Persediaan (Inventori) adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain. Termasuk persediaan yang berasal dari pihak lain atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut. Persediaan ini meliputi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang hasil produksi yang siap untuk dijual.

1.6. Pembayaran Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode tersebut tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya dibayar dimuka meliputi Uang Muka, Biaya Bunga, Premi Asuransi, Sewa, Pajak, dan Biaya Lainnya.

1.7. Aset Lancar Lainnya adalah aset lancar selain yang telah disebutkan misalnya aset pajak tangguhan.

2. ASET TIDAK LANCAR adalah bagian harta yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pemakaiannya lama **(> 1 tahun)**. Rincian Aset Tidak Lancar sebagai berikut (*Blok II.A Rinc 2.1 + Rinc 2.2 + Rinc 2.3 + Rinc 2.4 – Rinc 2.5 + Rinc 2.6*):

2.1. Investasi Jangka Panjang adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam waktu **lebih dari satu tahun** (*Blok III.A Rinc 2.1.a s/d Rinc 2.1.d*).

2.1.a. Deposito merupakan simpanan yang menghasilkan bunga dengan jangka waktu **lebih dari satu tahun** dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan atas nama pemilik deposito tersebut.

2.1.b. Investasi dalam Bentuk Instrumen Ekuitas (saham, dll) mencerminkan kepemilikan saham di perusahaan lain (saham biasa maupun preferen). Saham adalah penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.

2.1.c. Investasi dalam Bentuk Instrumen Utang (obligasi, dll) adalah warkat yang berisi pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu misalnya obligasi.

2.1.d. Investasi Jangka Panjang Lainnya penanaman modal yang dilakukan perusahaan dalam bentuk surat berharga selain saham & obligasi, misalnya reksadana.

2.2. Piutang Tidak Lancar adalah hak atau tagihan perusahaan kepada perusahaan lain yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo (lebih dari satu tahun). Piutang jangka panjang terdiri dari Piutang Usaha, Piutang Pegawai, Piutang dari Perusahaan Afiliasi, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

2.3. Aset Tetap Berwujud adalah aset yang memiliki substansi nyata dan dimanfaatkan dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Tujuan pemilikan aset tetap berwujud adalah untuk operasi perusahaan dalam jangka panjang. Aset tetap berwujud dinilai dengan biaya perolehan.

2.3.a. Tanah adalah aset tetap yang umurnya tak terbatas seperti tanah untuk bangunan perusahaan, tanah pertanian, dan lainnya. Tanah dinilai berdasarkan nilai perolehan[2] dan tidak dikenakan penyusutan (*non depreciable)*.

2.3.b. Bangunan adalah aset tetap berupa bangunan yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan aset sejenis jika habis penggunaannya. Kelompok aset ini dan selanjutnya dikenakan penyusutan (*depreciable)* dan dinilai atas harga perolehan.

2.3.c. Mesin dan perlengkapan adalah alat/perkakas (non kendaraan) untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau

[2]Nilai perolehan adalah harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan aset tersebut sampai siap digunakan

motor penggerak, dengan menggunakan listrik, bahan bakar minyak, atau tenaga alam sebagai sumber energi.

2.3.d. Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan manusia atau objek lainnya.

2.3.e. Peralatan Lainnya adalah alat/perkakas (non kendaraan) yang tidak membutuhkan energi dalam penggunaannya.

2.3.f. Tanaman dengan Produk Berulang adalah tanaman yang menghasilkan produk berulang dengan usia manfaat tanaman dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Misalnya: kelapa sawit, mangga, apel, karet, dll.

2.3.g. Hewan dengan Produk Berulang adalah hewan yang menghasilkan produk berulang dengan usia manfaat hewan dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Misalnya: sapi perah, ayam petelur, dll.

2.4. Aset Tetap Tidak Berwujud adalah suatu aset yang tidak memiliki substansi nyata yang nilainya timbul karena hak-hak yang diperoleh dari kepemilikan harta tersebut dan dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset tetap tak berwujud misalnya hak paten, biaya praoperasi (riset dan pengembangan) serta instalasi program (*set up*). Aset tetap tidak berwujud dinilai dengan biaya perolehan.

- **Hak Paten** adalah hak ekslusif yang diberikan pemerintah kepada pencipta barang dan jasa untuk memproduksi dan memasarkan suatu barang dan jasa tertentu disertai perlindungan hukum dari pemalsuan dan peniruan. Hak Paten terdiri dari *Goodwill, Franchise,* Lisensi, dan *Trade Mark.*
  - ***Goodwill*** adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibanding perusahaan lain. Misalnya, letak perusahaan yang strategis, manajemen perusahaan yang baik, produk unggul yang sudah dikenal masyarakat, dan lainnya).
  - ***Franchise*** adalah hak kelola pendistribusian barang atau jasa kepada masyarakat konsumen yang dijual kepada pihak lain dengan standardisasi mutu, misalnya pengelolaan *Kentucky Fried Chicken.*

- **Lisensi** adalah izin khusus dari pribadi atau perusahaan kepada pribadi atau perusahaan lain, misalnya hak menerbitkan, hak memperdagangkan barang dan jasa, dan lain-lain.
- ***Trade Mark*** adalah hak menggunakan suatu tanda pengenal atau simbol dari suatu barang yang diusahakan dan disahkan oleh pemerintah serta dilindungi terhadap kemungkinan ditiru atau dipalsukan.

- **Biaya Praoperasi** adalah biaya-biaya yang terjadi sebelum dimulainya kegiatan usaha komersial perusahaan. Yang termasuk ke dalam kelompok biaya ini antara lain: biaya riset dan pengembangan dan biaya ditangguhkan lainnya. Biaya praoperasi dikapitalisasi dan diamortisasi dalam jangka waktu dan metode tertentu.
  - **Biaya Riset dan Pengembangan** adalah biaya yang dikeluarkan untuk riset, percobaan, analisa, penyajian serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan segala aspek operasi perusahaan.
  - **Biaya Ditangguhkan** adalah pengeluaran yang belum merupakan biaya dalam tahun buku yang sedang berjalan tetapi masih tercatat sebagai aset.

2.5. **Akumulasi Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi** adalah total penyusutan atas aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yang dinilai dengan metode tertentu. Akumulasi penyusutan, deplesi, dan amortisasi merupakan *contra assets* dari nilai perolehan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud untuk mendapatkan nilai buku aset tersebut pada periode tertentu.

2.6. **Aset Tidak lancar Lainnya** adalah aset lain-lain yang tidak digolongkan ke dalam kelompok aset perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya seperti Pinjaman Karyawan, Hak Sewa Jangka Panjang, Uang Jaminan, dan Lainnya.

B. LIABILITAS/KEWAJIBAN DAN EKUITAS/MODAL

1. **LIABILITAS/KEWAJIBAN** adalah kewajiban perusahaan untuk melunasi suatu jumlah utang atau melaksanakan suatu kewajiban kepada pihak lain jika telah jatuh tempo. Liabilitas terdiri dari Liabilitas jangka pendek dan Liabilitas Jangka Panjang (*Blok III.B Rinc 1.1 + Rinc 1.2*).

   1.1. Liabilitas Jangka Pendek adalah utang jangka pendek yang diperkirakan harus dilunasi kurang atau sama dengan 1 tahun ($\leq$ 1 tahun). Liabilitas Jangka Pendek terdiri dari (*Blok III.B Rinc 1.1.a s/d Rinc 1.1.c*):

   1.1.a. Utang Usaha adalah utang kepada pihak lain karena perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu $\leq$ 1 tahun.

   1.1.b. Utang ke Bank dan Pihak Lain adalah pinjaman untuk modal kerja perusahaan (baik dalam rupiah atau valuta asing) yang diperoleh baik dari bank maupun pihak lain yang harus dilunasi dalam waktu $\leq$ 1 tahun.

   1.1.c. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya meliputi Utang Pajak, Uang Muka dari Langganan, dll.

   - **Utang Pajak** adalah beban yang dikenakan atas penghasilan, kekayaan, transaksi/sumber-sumber lainnya dari perusahaan untuk dibayarkan kepada pemerintah.
   - **Utang yang Masih Harus Dibayar** adalah utang yang masih harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain untuk kepentingan perusahaan. Utang-utang ini terdiri dari utang sewa dan utang bunga.
   - **Uang Muka dari Langganan** adalah sejumlah uang dari pihak lain (pemesan) yang dititipkan kepada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan melakukan penyelesaian order dari pihak lain tersebut dengan memperhitungkan termin yang diajukan.

   1.2. Liabilitas Jangka Panjang adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun (*Blok III.B Rinc 1.2.a s/d Rinc 1.2.c*).

1.2.a. Utang Usaha adalah utang perusahaan (berupa rupiah atau valuta asing) kepada pihak lain karena perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun.

1.2.b. Utang Bank dan Pihak Lain adalah pinjaman untuk modal kerja perusahaan (baik dalam rupiah atau valuta asing) yang diperoleh baik dari bank maupun pihak lain yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Rincian ini terdiri dari nilai utang jangka panjang setelah dikurangi pokok cicilan utang yang sudah dibayar.

1.2.c. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya adalah selain kategori liabilitas jangka panjang yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya:

- **Utang Pajak Tangguhan** adalah konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak kewajiban.
- **Utang Sewa Guna Usaha** adalah beban sewa atas penggunaan tanah, bangunan/gedung, mesin-mesin, peralatan dan kendaraan yang dikuasai dan digunakan berdasarkan kontrak dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- **Setoran Jaminan** adalah uang jaminan yang diterima dari pihak lain oleh perusahaan dengan ketentuan sesuai perjanjian yang telah disepakati kegunaannya untuk menjamin keamanan/kelancaran transaksi dari barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

2. EKUITAS/MODAL adalah sumber dana perusahaan baik yang berasal dari pemilik maupun kreditor. Sumber dana ini digunakan untuk membeli harta-harta yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dengan demikian baik pemilik maupun kreditor berhak atas kekayaan perusahaan.

2.1. Modal Saham Ditempatkan dan Disetor adalah sebagian dari modal dasar yang telah ditentukan kepemilikannya di dalam akta pendirian

atau perubahannya sebagai pemegang saham dan telah disetorkan oleh para pemegang sahamnya tersebut.

2.2. Tambahan Modal Disetor merupakan selisih lebih jumlah setoran modal yang diterima perusahaan dari nilai par (nominal) saham pada saat penerbian saham.

2.3. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan merupakan akumulasi keuntungan operasional perusahaan yang belum atau tidak dibagikan ke pemegang saham.

2.4. Modal Lainnya yaitu modal yang tidak tercakup dalam item sebelumnya. Misalnya: keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas instrumen keuangan derivatif, akumulasi selisih kurs penjabaran laporan keuangan, dll.

2.5. Kepentingan Non Pengendali yaitu modal yang berasal dari pemilik selain induk di anak perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan. Kepentingan non pengendali hanya muncul dalam laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan yang menggabungkan induk dan semua anak perusahaan yang dikendalikan oleh induk.

BLOK IV. LAPORAN LABA RUGI (LLR) DAN PERUBAHAN SALDO LABA (PADA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)

A. LAPORAN LABA RUGI (LLR)

1. Pendapatan usaha merupakan pendapatan (utama dan usaha lainnya) dikurangi dengan retur penjualan dan potongan harga.

1.1. Pendapatan (utama dan usaha lainnya) merupakan penjumlahan dari pendapatan utama dan pendapatan usaha lainnya.

- **Pendapatan utama** merupakan pendapatan dari hasil penjualan dengan kriteria nilai yang paling tinggi atau volume fisik maupun waktu pengerjaannya yang paling besar.
- **Pendapatan usaha lainnya** merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk sekunder (produk ikutan + produk sampingan) yang dihasilkan selain produk utama.

- **Produk Ikutan** adalah barang & jasa yang dihasilkan bersama dengan produk utama atas penggunaan teknologi tunggal.
- **Produk Sampingan** adalah barang & jasa yang dihasilkan sejalan dengan produk utama tapi menggunakan teknologi yang berbeda.

1.2. Retur penjualan dan potongan harga

- **Retur penjualan** merupakan penerimaan barang oleh penjual dari pihak pembeli dengan alasan barang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli.
- **Potongan harga** merupakan pengurangan harga produk dari harga normal.

2. Biaya Pokok Penjualan *(cost of goods sold/cost of sales)* adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan mempersiapkan barang sampai siap dijual yaitu penjumlahan biaya pokok produksi, persediaan awal barang jadi, dan pembelian barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, dan pemakaian sendiri. (*Blok IV.A Rinc 2.1 + Rinc 2.2 - Rinc 2.3 + Rinc 2.4 - Rinc 2.5*).

2.1. Biaya Pokok Produksi adalah penjumlahan biaya produksi dan persediaan awal barang dalam proses dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses (*Blok IV.A Rinc 2.1.a + Rinc 2.1.b - Rinc 2.1.c*).

2.1.a. Biaya Produksi bagi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha industri pengolahan antara lain Pemakaian Bahan Baku dan Penolong, Upah dan Gaji Tenaga Kerja Produksi, Penyusutan Alat-alat Produksi, Utilitas untuk Produksi, Bahan Bakar, dll (*Blok IV.A Rinc 2.1.a.1 s/d Rinc 2.1.a.8*).

2.1.b. Persediaan Awal Barang dalam Proses adalah jumlah barang dalam proses yang ada di perusahaan pada awal periode pencatatan.

2.1.c. Persediaan Akhir Barang dalam Proses adalah jumlah barang dalam proses yang ada di perusahaan pada akhir periode pencatatan.

2.2. Persediaan Awal Barang Jadi adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan pada awal periode pencatatan.

2.3. Persediaan Akhir Barang Jadi adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan pada akhir periode pencatatan.

2.4. Pembelian Barang Jadi adalah jumlah pembelian barang jadi dari pihak lain oleh perusahaan untuk dijual kembali.

2.5. Pemakaian Sendiri adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan yang digunakan untuk konsumsi perusahaan itu sendiri.

3. **Laba (Rugi) Bruto Usaha** merupakan pengurangan pendapatan usaha dengan biaya pokok penjualan (*Blok IV.A Rinc 1 - Rinc 2*).
4. **Biaya Administrasi dan Penjualan** merupakan penjumlahan biaya administrasi umum dan biaya penjualan (*Blok IVA. Rinc 4.1 s/d Rinc 4.14*).
   - **Biaya Administrasi** adalah biaya yang bersifat umum dalam perusahaan, misalnya upah dan gaji tenaga kerja tak langsung, biaya utilitas (listrik, air, dan telepon), pemeliharaan, iuran, sumbangan, dan lain-lain.
   - **Biaya Penjualan** adalah semua biaya yang terjadi yang berhubungan dengan menjual dan memasarkan barang dan jasa seperti biaya promosi dan iklan, pajak atas lainnya atas produksi, dan lain-lain.
5. **Laba (Rugi) Neto Usaha** merupakan pengurangan Laba (Rugi) Bruto Usaha dengan Biaya Usaha (*Blok IV.A Rinc.3 - Rinc 4*).
6. **Selisih Pendapatan dengan Biaya di Luar Usaha** adalah pendapatan di luar usaha dikurangi dengan biaya di luar usaha (*Blok IV.A Rinc 6.1 - Rinc 6.2*).

   6.1. Pendapatan di Luar Usaha adalah pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan. Termasuk dalam kelompok pendapatan ini antara lain: jasa giro, laba selisih kurs, penjualan aktiva tetap dan suku cadang, pendapatan sewa, dan lain-lain (*Blok IV.A Rinc 6.1.a s/d Rinc 6.1.h*).
      - **Laba selisih kurs** adalah laba yang terjadi karena proses translasi atas transaksi dalam mata uang asing.
      - S**ubsidi** dalam pendapatan di luar usaha mencakup subsidi yang diterima dan tidak berkaitan dengan proses produksi.

6.2. Biaya di Luar Usaha adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan utama perusahaan (*Blok IV.A Rinc 6.2.a s/d Rinc 6.2.d*).

7. **Laba (Rugi) Sebelum Pajak** yaitu penjumlahan Laba (Rugi) neto usaha & selisih pendapatan dan biaya di luar usaha (*Blok IV.A Rinc 5 + Rinc 6*).
8. **Pajak Penghasilan** adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh perusahaan.
9. **Laba (Rugi) Tahun Berjalan** merupakan pengurangan Laba (Rugi) Sebelum Pajak dengan Pajak Penghasilan (*Blok IV.A Rinc 7 - Rinc 8*) = (*Blok IV.A Rinc 9.1 + Rinc 9.2*)
   9.1. Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk merupakan laba (rugi) yang menjadi milik entitas induk.
   9.2. Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali merupakan laba (rugi) yang menjadi milik kepentingan non pengendali.

B. PERUBAHAN SALDO LABA (PADA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)

1. **Pembayaran Dividen** (Keuntungan Perusahaan yang Dibagikan Kepada Pemilik Modal) adalah bagian laba yang diberikan kepada pemilik/pemegang saham perusahaan. Bagian ini berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama menjalankan kegiatannya dalam satu periode.
2. **Kenaikan (Pengurangan) Saldo Laba Lainnya**, misalnya: penghasilan komprehensif lain (keuntungan revaluasi aset tetap, pengukuran kembali atas imbalan pasti, dan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi).
3. **Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu** merupakan bagian laba (rugi) ditahan tahun lalu.
4. **Laba (Rugi) yang Ditahan** adalah Laba (Rugi) bersih dikurangi pembayaran dividen, ditambah kenaikan (pengurangan) saldo laba lainnya ditambah sisa Laba (Rugi) tahun lalu (*Blok IV.A Rinc 9.1 – IV.B Rinc 1 + IV.B Rinc 2 + IV.B Rinc 3*).

BLOK V. PENAMBAHAN ASET TETAP

Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait penambahan aset tetap pada perusahaan. Nilai penambahan barang modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memiliki dan menggunakan barang modal atau aset tetap pada suatu periode akuntasi. Penambahan aset tetap mencakup:

1. Pembelian, produksi, barter, transfer, sewa beli (*financial lease*) barang modal baru dalam negeri;
2. Pembelian aset tetap baru/bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter aset tetap);
3. Perbaikan besar aset untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai;
4. Pertumbuhan aset yang dibudidaya; dan
5. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tak diproduksi, seperti tanah, lisensi, dan sebagainya.

BLOK VI. BIAYA JAMINAN KESEHATAN TENAGA KERJA

Blok ini bertujuan untuk menangkap informasi terkait jaminan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya. Jaminan yang dicakup yakni jaminan kesehatan, bukan jaminan ketenagakerjaan. Suatu perusahaan dapat memberikan jaminan kesehatan bagi karyawannya melalui berbagai bentuk/mekanisme antara lain:

1. **BPJS Kesehatan**; diisi apabila perusahaan memiliki biaya untuk membayarkan premi/iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bagi karyawannya ke BPJS Kesehatan.
2. **Asuransi Kesehatan Swasta**; diisi apabila perusahaan memiliki biaya untuk membayarkan premi asuransi kesehatan bagi karyawannya ke perusahaan asuransi swasta.
3. **Kontrak RS**; diisi apabila perusahaan memiliki biaya untuk membayarkan biaya pelayanan kesehatan untuk pengobatan karyawan di fasilitas kesehatan (dapat berupa RS, klinik, atau praktik dokter) yang bekerjasama dengan perusahaan.
4. **Diselenggarakan sendiri**; diisi apabila perusahaan memiliki biaya untuk membayarkan biaya pelayanan kesehatan untuk pengobatan karyawan di fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh perusahaan

5. **Reimburse kepada karyawan**; diisi apabila perusahaan memberikan sejumlah uang untuk penggantian biaya berobat yang diajukan karyawannya.
6. **Lainnya**; diisi apabila perusahaan memiliki pengeluaran kesehatan selain yang disebut di atas, antara lain:
    - Lumpsum: pemberian sejumlah uang tunai secara langsung kepada karyawan untuk biaya kesehatan/pengobatan.
    - Pelayanan promotif preventif: program K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan *medical check up*/pemeriksaan kesehatan secara berkala.
    - CSR bidang kesehatan: tanggung jawab sosial perusahaan terkait penyediaan pelayanan kesehatan, misalnya promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pengobatan gratis bagi masyarakat, pemberian ambulans bagi fasilitas kesehatan, pembangunan posyandu, dll.

BLOK VII. CATATAN

Tuliskan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.

BLOK VIII. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN

Tujuan blok ini adalah selain untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengisian daftar isian (kuesioner) ini dan kapan dilakukan pencacahan serta pemeriksaan, juga untuk melihat keabsahan pencacahan.

Isikan nama, tanggal pencacahan/pemeriksaan/pengawasan serta tanda tangan pencacah dan pemeriksa/pengawas. Responden juga diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan (jika ada) pada tempat yang tersedia.

Data Mencerdaskan Bangsa

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291
Homepage : www.bps.go.id